

Membongkar realitas kerja paksa di balik megahnya jalan Anyer-Panarukan dalam bidang ekonomi

Ilsa Fikrotul Ulum¹, Nesa Nova Winengsih², Alma Baisyura³, Tika Imro'atul Muniroh⁴

Pendidikan ilmu pegetahuan sosial, Universitas islam negeri maulana malik Ibrahim malang

email:Ilsaulumm@gmail.com,

Kata Kunci:

infrastruktur; ekonomi kolonial; kerja paksa; Jalan Anyer-Panarukan; dan eksplorasi tenaga kerja.

Keywords:

Infrastructure; colonial economy; forced labor; the Anyer-Panarukan road; and labor exploitation.

ABSTRAK

Di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, jalan Anyer-Panarukan yang membentang sepanjang 1.000 kilometer di Pulau Jawa merupakan salah satu megaprojek infrastruktur kolonial Belanda di awal tahun 1800-an. Pamor jalan ini sebagai jalur perdagangan dan transportasi yang strategis menyembunyikan fakta tentang kerja paksa, eksplorasi tenaga kerja pribumi, dan dampaknya terhadap struktur ekonomi lokal. Melalui pendekatan sejarah ekonomi, penelitian ini menganalisis bagaimana sistem kerja paksa dan pemaksaan kerja rodi mempengaruhi agribisnis. Menurut temuan, pihak kolonial mendapat manfaat paling besar dari peningkatan keterhubungan

ekonomi Jalan Anyer-Panarukan dan pengiriman barang yang lebih cepat seperti gula dan kopi, sementara penduduk asli mengalami kemiskinan, kelaparan, dan kemerosotan sosial-ekonomi. Studi ini mendorong pemikiran kritis tentang dampak ekonomi dari inisiatif kolonial dengan mengkonfirmasi bahwa pembangunan infrastruktur yang mewah sering kali menyembunyikan pengorbanan yang signifikan dari masyarakat yang kurang mampu.

ABSTRACT

Under the administration of Governor General Herman Willem Daendels, the Anyer-Panarukan road, which spanned 1,000 kilometers on Java Island, was one of the Dutch colonial infrastructure megaprojects in the early 1800s. The road's prestige as a strategic trade and transportation route hides the facts about forced labor, exploitation of indigenous labor, and its impact on local economic structures. Through an economic history approach, this study analyzes how the forced labor system and forced indentured servitude affected agribusiness. According to the findings, the colonials benefited the most from the increased economic connectivity of the Anyer-Panarukan Road and faster delivery of goods such as sugar and coffee, while the indigenous population experienced poverty, hunger and socio-economic decline. This study encourages critical thinking about the economic impact of colonial initiatives by confirming that lavish infrastructure development often hides significant sacrifices from underprivileged communities.

Pendahuluan

Sejarah nasional Indonesia merupakan rangkaian peristiwa yang mencerminkan perjuangan kolektif bangsa dalam membangun identitas dan kedaulatan dari masa prakolonial hingga pascakemerdekaan(Hentihu, 2024). Salah satu wilayah yang mencerminkan dinamika sejarah nasional adalah Anyer, sebuah kota pesisir di Provinsi Banten. Anyer memiliki posisi strategis sejak masa kolonial karena letaknya yang menghadap langsung ke Selat Sunda. Pembangunan jalan ini tidak hanya menggambarkan ambisi kolonial dalam memperkuat kendali atas wilayah Nusantara,



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

tetapi juga mencerminkan penderitaan rakyat Indonesia yang dipaksa bekerja secara paksa dalam proses konstruksinya. Kerja rodi atau kerja paksa merupakan salah satu bentuk eksploitasi tenaga kerja yang menjadi bagian kelam dari sejarah kolonialisme di Indonesia. Sistem ini memaksa masyarakat pribumi untuk bekerja dalam proyek-proyek besar tanpa mendapatkan upah atau perlakuan yang layak. Mereka sering kali harus bekerja dalam kondisi yang sangat berat, mengalami kelaparan, kelelahan ekstrem, bahkan kematian. Salah satu proyek pembangunan paling terkenal yang dibangun dengan kerja paksa adalah jalan raya Anyer-Panarukan yang dilaksanakan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels antara tahun 1808 hingga 1811.

Pemerintah kolonial Belanda secara strategis merancang struktur ruang lanskap pada beberapa daerah, untuk mendukung kepentingan politik, sosial, dan tata kota kolonial yang berorientasi pada segregasi dan dominasi (Firmansyah, 2016). Pembangunan jalan sepanjang sekitar 1.000 kilometer ini dimaksudkan sebagai proyek strategis guna memperkuat pertahanan militer Belanda dari serangan Inggris, serta mempercepat arus distribusi logistik dan mobilisasi pasukan dari barat ke timur Pulau Jawa. Selain itu, proyek ini juga memiliki fungsi ekonomi dengan membuka jalur perdagangan dan akses transportasi antardaerah. Namun di balik kepentingan politik dan ekonomi tersebut, proyek ini menyimpan kenyataan pahit. Rakyat dipaksa bekerja siang dan malam, menebas hutan, menggali tanah, dan membangun jalan tanpa peralatan memadai dan tanpa jaminan keselamatan. Mereka meninggalkan sawah, ladang, dan keluarga, yang pada akhirnya turut memicu kemerosotan kesejahteraan masyarakat desa.

Pelaksanaan proyek ini menunjukkan bahwa kemajuan infrastruktur yang dibanggakan pemerintah kolonial justru dibangun di atas penderitaan rakyat. Tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik dan mental bagi para pekerja paksa, proyek ini juga membawa dampak ekonomi yang serius. Kehilangan tenaga kerja di sektor pertanian membuat banyak daerah mengalami krisis produksi pangan, sementara masyarakat desa jatuh ke dalam kemiskinan yang semakin dalam. Dalam jangka panjang, pembangunan jalan ini juga mengubah struktur sosial dan ekonomi masyarakat Jawa, serta meninggalkan warisan ketimpangan yang masih terasa hingga hari ini. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mengungkap fakta sejarah mengenai pelaksanaan kerja rodi dalam pembangunan jalan Anyer-Panarukan, serta menelaah bagaimana kondisi para pekerja selama proyek berlangsung. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami dampak ekonomi yang ditimbulkan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, terhadap masyarakat pribumi. Dengan pendekatan historis dan analisis kritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai bagaimana proyek yang dianggap simbol kemajuan kolonial ini justru menyimpan luka sosial dan ekonomi yang mendalam bagi bangsa Indonesia.

Pembahasan

Sejarah sangat penting untuk di pelajari, karena dalam sejarah terdapat beberapa fakta informasi tentang tokoh, atau bisa perkembangan peradaban manusia, dan juga bisa mengenai peristiwa terdahulu seperti membongkar realitas kerja paksa dibalik

megahnya jalan anyer-panarukan. Dalam sejarah memiliki peran penting dalam membangun dan memperkuat identitas bangsa, dan memiliki soliditas yang tinggi. (Ummami & Fauziyah, 2025)

Louis Napoleon mengirimkan Herman Willem Daendels sebagai gubernur jeneral Hindia Belanda untuk memimpin Jawa. Daendels tidak hanya memimpin Hindia Belanda, tetapi juga membuat kebijakan baru untuk kepentingan pemerintahan Belanda. Selama pemerintahannya, Daendels terus menegakkan nilai-nilai pemerintahan revolusioner. Gagasan dan perubahan yang dibawa Daendels bertujuan untuk menghentikan berbagai taktik yang mengarah pada pelanggaran hukum yang terjadi di tanah Jawa. Para Dewan Hindia sangat menakuti Daendels di Hindia Belanda. Daendels mengantisipasi dan melaksanakan semua kebijakannya sendiri. Daendels menganggap dirinya sebagai diktator. Daendels membuat kebijakan dan kekuasaan yang sangat berpengaruh. Dia sangat terkenal karena pencapaiannya, tetapi mungkin ada orang yang tidak menyukainya.(Hartatik, 2016). Pada awalnya, tugas utama Daendels ialah merestrukturisasi pemerintahan dan melindungi Batavia dari serangan Inggris. Namun, Daendels membuat beberapa kebijakan selama pemerintahannya. Salah satunya adalah pembangunan jalan raya antara Anyer dan Panarukan yang panjangnya sekitar 1000 kilometer. Jalan Pos dan Jalan Daendels adalah nama jalan raya tersebut. Pada awalnya, jalan raya tersebut hanya diperluas dan diperbaiki dari Anyer hingga Batavia. Pada saat Daendels tiba di Batavia, jalan raya tersebut sudah ada.

Pulau Jawa membutuhkan jalur yang dapat menghubungkan antar wilayah karena kepentingan ekonomi dan militer selama pemerintahan Daendels. Daendels memaksa penduduk Jawa untuk melakukan kerjaredi sebagai bagian dari kebijakannya untuk membangun jalanrayapos baru. Kegiatan rodi tidak hanya membangun jalan raya pos baru, tetapi juga memperbaiki dan meningkatkan jalan raya pos yang sudah ada. Hal ini dilakukan agar jalan raya yang sudah ada menjadi lebih baik lagi dan dapat digunakan oleh pemerintah Belanda. Ketika jalan raya pos dibangun, diperkirakan 12.000 orang menjadi korban.(Fitriyana Damayanti, Ghumayda Tsurayya & Basyari, 2023)Antoine Laurent de Jussieu Daendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada awal abad ke-19, melakukan berbagai kebijakan sosial dan ekonomi yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan mengeksplorasi sumber daya di tanah jajahan, kebijakan ini bertujuan untuk mendukung perang Perancis melawan Inggris. Di bawah pimpinan Daendels, suku asli dipaksa menyerahkan hasil pertanian mereka kepada pemerintah kolonial tanpa kompensasi yang memadai.

Tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan pemerintah kolonial sehingga mereka dapat mendanai perang, tetapi seringkali menyebabkan masalah besar bagi rakyat lokal. Daendels juga menjual tanah kepada pihak swasta untuk mendapatkan lebih banyak uang. Namun demikian, langkah ini memperkaya kekayaan kolonial, yang berdampak buruk pada komunitas lokal yang kehilangan akses ke tanah mereka. Untuk meningkatkan pendapatan kolonial dari ekspor, Daendels juga berkonsentrasi pada pembuatan barang-barang yang dapat diakses di seluruh dunia. Namun, petani sering dipaksa menanam komoditas tertentu dan mengabaikan kebutuhan lokal karena kebijakan ini.(Kurniawan, 2015)Selain itu, Daendels meningkatkan beban ekonomi penduduk asli dengan memungut pajak yang tinggi dari mereka. Di sisi lain, Daendels

mengintegrasikan wilayah-wilayah kasultanan dan kasunanan sebagai bagian dari sistem kolonial Belanda, meningkatkan dominasi Belanda di Indonesia. Meskipun kebijakan seperti pemakaian pajak dan penjualan tanah kepada pihak swasta dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan administrasi kolonial, Daendels sering digambarkan sebagai tiran. Pemerintah kolonial Belanda memberlakukan hukuman berat terhadap pejabat korup, tetapi tindakan-tindakan Daendels tetap meninggalkan jejak ketidakadilan dan eksplorasi yang mendalam di masyarakat.

Tujuan dari proyek besar yang dimulai oleh Gubernur Jenderal Belanda Herman Willem Daendels adalah untuk membangun jalan raya dan pelabuhan yang menghubungkan Anyer dengan Panarukan. Tujuannya adalah untuk mempercepat perjalanan dari lebih dari satu bulan menjadi hanya selama delapan hari. Ribuan orang dipekerjakan untuk menjalankan megaprojek ini, baik dari Eropa maupun orang asli. Namun, banyak pekerja meninggal karena kondisi kerja yang sangat buruk di rawa-rawa. Proyek ini dianggap sangat mematikan karena penyakit malaria menyebar dengan cepat, dan Velderhof menyebutnya "Kuburan Belanda" pada tahun 1901. Korban sangat banyak, dan menurut catatan Duinen pada ribuan orang meninggal karena malaria di wilayah itu pada tahun 1918. Ketika Sultan Banten menolak untuk mengirimkan pekerja baru karena alasan kemanusiaan dan tingkat kematian yang tinggi sebelumnya, Daendels menentang alasan itu dan mengirim kembali utusan dengan tuntutan yang sangat berat. Komandan Du Puy, utusan Daendels, meminta Sultan Banten untuk memenuhi lima tuntutan sebelum 15 November 1808; ini termasuk memindahkan keraton Sultan ke Anyer dan mengirimkan 1.000 pekerja setiap hari. (Pulungan et al., 2023)

Ketidakmampuan Sultan Banten untuk memenuhi tuntutan ini menunjukkan betapa tidak adilnya tanggung jawab yang diberikan oleh Daendels kepada proyek ini, yang menyebabkan banyak kematian dan penderitaan bagi karyawan. Daendels menerapkan sistem kerja paksa terhadap masyarakat pribumi, yang digagasnya untuk kepentingan pemerintahan Belanda di tanah jajahan, menyebabkan kesulitan bagi masyarakat pribumi. Banyak masyarakat adat yang kehilangan nyawa karena kelelahan dan tekanan tebasan selama pembuatan jalur ini. Selain itu, wabah penyakit malaria yang menjadi momok bagi masyarakat pribumi juga menyebabkan kehilangan nyawa. Kaum pribumi berada dalam posisi yang buruk selama era kolonial Belanda karena sistem kerja paksa. Indonesia dilayani seperti budak di negara "terjajah". Bagaimana penjajah memperlakukan Dengan sistem kerja rodi, Indonesia memanfaatkan kekuatan dan harga diri bangsa hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Gubernur Jendral Daendels tidak hanya suka bertindak semena-mena terhadap orang biasa, tetapi dia juga tidak segan-segan merendahkan kelas sosial raja. Untuk tetap hidup dan mempertahankan kedudukannya di tanah jajahan, para menner Belanda harus mendapatkan strata sosial. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda dan membuat penduduk asli mengikuti perintahnya.

Pemerintah Belanda menahan para raja pribumi untuk tetap mempertahankan kedudukannya. Kaum pribumi dipandang rendah oleh Belanda. Daendels menunjukkan salah satunya yang melakukan kesalahan ketika berjabat tangan dengan raja Jawa;

Daendels tidak takut bahkan mungkin merendahkan bangsawan Jawa; sebaliknya, dia suka membalas jabatan tangan dengan tangan kiri. Daendels, gubernur jenderal kolonial Belanda, adalah orang yang kejam dan sombong. Daendels sangat menentang peraturan yang dibuat oleh raja-raja Jawa selama kekuasannya. Salah satu peraturan yang dia lawan adalah dia tidak ingin melepas topi saat bertemu dengan raja. Pada era kolonial, Belanda merumuskan kebijakan hukum yang menggeser peran hukum yang sudah ada dalam masyarakat pribumi(Mahmudi, 2016).Selain itu, Daendels tidak menghargai raja-raja di tanah Jawa dan suka membalas jabatan. Dia juga ingin duduk di kursi yang sama dengan raja. Tangan kanan raja dan tangan kiri mereka. Ini menunjukkan bahwa penduduk asli juga mengalami penindasan tidak terhormat terlepas dari status sosial mereka. Dengan sikap angkuh Daendels, seorang pemimpin yang seharusnya dihormati oleh rakyat justru diperlakukan rendah atau bahkan hina.(Sinaga et al., 2024)

Dampak ekonomi

pada awal abad ke-19, gubernur jenderal herman willem daendels membangun jalan raya pos anyer-panarukan, yang memiliki panjang lebih dari 1.000 km, yang mempercepat pengiriman hasil bumi seperti kopi, tebu, dan rempah-rempah dari pedalaman ke pelabuhan-pelabuhan utama seperti cirebon dan indramayu. Ini memiliki dampak ekonomi yang besar bagi indonesia, khususnya pulau jawa. Sebagai contoh, waktu pengiriman yang sebelumnya memakan waktu sekitar 40 hari antara batavia dan surabaya dapat dipersingkat menjadi hanya 5 hingga 7 hari.

Jalan ini membuat kota-kota seperti bogor, bandung, dan cirebon menjadi pusat perdagangan dan perindustrian. Pasar konvensional, rumah tangga, dan industri jasa berkembang karena kemudahan transportasi, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. jalan ini memfasilitasi eksploitasi sumber daya alam oleh pemerintah kolonial belanda, memungkinkan mereka untuk mengangkut hasil bumi dari pedalaman ke pelabuhan dengan lebih efisien. Hal ini berkontribusi pada peningkatan pendapatan pemerintah kolonial dari sektor ekonomi jawa. pembangunan jalan ini dilakukan dengan sistem kerja paksa (kerja rodi), yang menyebabkan penderitaan besar bagi masyarakat pribumi. Ribuan pekerja meninggal akibat kondisi kerja yang buruk, kekurangan makanan, dan penyakit.(yoel kurniawan raharjo, 2024)

Kesimpulan

Di bawah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, Jalan Raya Pos Anyer-Panarukan dibangun sebagai proyek infrastruktur kolonial yang secara strategis mendukung kepentingan komersial dan militer Belanda. Namun, sistem kerja paksa yang tidak manusiawi digunakan untuk membangun proyek ini dengan mengorbankan pekerjaan dan nyawa penduduk asli. Selain dampak fisik dan sosial, dampaknya juga merugikan ekonomi lokal, termasuk penurunan hasil pertanian dan peningkatan kemiskinan. Meskipun mendorong pertumbuhan ekonomi kolonial dan mempercepat pengiriman hasil bumi, jalan tersebut hanya menguntungkan para penjajah, penelitian ini menunjukkan bahwa di balik kemewahan kemajuan kolonial, terdapat realitas ketidaksetaraan dan eksploitasi sistemik yang membuat penderitaan penduduk lokal semakin parah. Untuk memahami dampak jangka panjang terhadap struktur sosial dan

ekonomi Indonesia, sangat penting untuk memeriksa secara kritis warisan sejarah kolonial.

Daftar pustaka

- Firmansyah, A. Y. (2016). Struktur Ruang Lanskap Permukiman Kolonial Belanda di Kawasan Ijen Kota Malang dalam Menunjang Pengembangan Kota Ekologis. *Research Report. Fakultas Sains Dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang.* <http://repository.uin-malang.ac.id/3156/>
- Fitriyana Damayanti, Ghumayda Tsurayya, A., & Basyari, A. (2023). HERMAN WILLEM DAENDELS DALAM PUSARAN KERJA PAKSA PEMBANGUNAN JALAN RAYA POS, JALAN DAENDELS. *RINONTJE : JURNAL PENDIDIKAN DAN PENELITIAN SEJARAH*, 10.
- Hartatik, E. S. (2016). Perkembangan Jalan Raya Di Pantai Utara Jawa Tengah Sejak Mataram Islam Hingga Pemerintahan Daendels. *Paramita: Historical Studies Journal*, 26(2), 155–165.
- Hentihu, I. F. (2024). Sejarah nasional Indonesia. CV Gita Lentera, Padang, Pp. 1-195. <http://repository.uin-malang.ac.id/21820/>
- Kurniawan, H. (2015). Dampak Sistem Tanam Paksa terhadap Dinamika Perekonomian Petani Jawa 1830-1870. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2). <https://doi.org/10.21831/socia.v11i2.5301>
- Mahmudi, Z. (2016). *Dinamika hukum pada masa Kolonial Belanda: Studi atas kebijakan Pemerintah Belanda terhadap hukum waris.* <http://repository.uin-malang.ac.id/3543/>
- Pulungan, D., Harahap, A. S., Zahrah, A., & Sinaga, R. (2023). JALAN RAYA POS (ANYER-PANARUKAN) SEBAGAI BUKTI DARI KEBIJAKAN DAENDELS YANG MASIH ADA HINGGA SEKARANG. *PUTERI HIJAU : Jurnal Pendidikan Sejarah*, 8(1), 12–22. <https://doi.org/10.24114/ph.v10i1.64018>
- Sinaga, R., Pratama, D., Piliang, P. H., & Ningrum, D. M. (2024). Kemanusiaan dan Eksplorasi: Analisis Kebijakan Daendels di Tanah Jawa (1808-1811). AR RUMMAN - *Journal of Education and Learning Evaluation*, 1(2), 270–276.
- Ummami, R., & Fauziyah, N. (2025). Kritik Ideologis Narasi Sejarah Orde Baru: Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough pada Buku Teks IPS Kelas IX. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia*, 10, 154–170.
- Yoel Kurniawan Raharjo. (2024). Kebijakan Pemerintahan Daendels Di Jawa 1808-1811. *Candrasangkala: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah*, 10(1), 8–15.